

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No.54, Tahun 2010). Sejalan dengan pengertian tersebut, dokumen Renja Disperindag Jawa Timur tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Disperindag dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok. Dokumen Renja 2014 menjadi acuan bagi Disperindag Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja tahun 2014 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, dan pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Evaluasi dan kajian terhadap gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2014 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan. *Pertama*, tahap perumusan rancangan Renja,

yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran pelayanan SKPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas. *Kedua*, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja SKPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama.

Sebagai satu kesatuan dengan program pembangunan sektor industri dan perdagangan tahun-tahun sebelumnya, dalam keseluruhan proses penyusunan Renja 2014 telah mengikutsertakan pertimbangan atas capaian sasaran dan target pembangunan dalam RPJMD 2009-2014. Artinya, Renja 2014 sebagai tindak lanjut dan penerjemahan atas visi-misi, kebijakan serta program/kegiatan Disperindag sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014, dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja 2014 terdiri atas Undang-undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

3.1 Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan dasar gambaran program dan kegiatan tahun 2014, sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- b. Sebagai bahan/acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2014.

Tujuan

- a. Memberikan informasi pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, dan target pencapaian tahun berjalan, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Disperindag Provinsi Jawa Timur;
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disperindag Jatim dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

4.1 Sistematika Penulisan

Renja 2014 Disperindag Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 4 PENUTUP

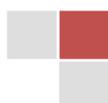
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Selanjutnya, hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja, target Renstra, target Renja dan perkiraan capaian Renstra disajikan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan s/d Tahun 2013
Provinsi Jawa Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2011	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012			Target Program/Kegiatan Renja Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Th. 2013		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perindustrian										
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	7,0	6,06	6,00	6,34	105,67	6,50	5,59	86,00	
Program peningkatan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	27	27,13	27,00	27,11	100,41	27,00	26,6	98,52	
Program peningkatan industri berbasis	Persentase kontribusi nilai ekspor produk	83	93,34	82,00	91,82	111,98	83,00	90,76	109,35	



sumber daya alam	industri pengolahan terhadap total ekspor non-migas Jatim									
Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	SDM IKM terlatih	6.250	4.242	4.250	8.643	203,36	5.250	9.794	186,55	
Program peningkatan kualitas sumber daya manusia	Fasilitasi produksi IKM	1.250	1.100	1.050	468	44,57	1.150	440	38,26	
Program peningkatan kapasitas teknologi industri	Meluasnya jaringan pasar industri kecil menengah	400	325	350	360	102,86	375	336	89,6	
Program peningkatan standarisasi industri	IKM bersertifikat SNI	8	3	6	6	100,00	7	7	100	
	IKM Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	925	273	760	749	98,55	840	905	107,74	
	Desain Produk industri	700	168	600	746	124,33	650	865	133,08	
	SDM IKM terlatih bidang desain kemasan	1.200	300	1.150	994	86,43	1.175	1.373	116,85	



	Perusahaan bersistem mutu (ISO, HACCP, GMP)	18	9	14	6	42,86	16	16	100	
	Permodalan bagi IKM	1.040	922	978	982	100,41	1.010	1.044	103,37	
Perdagangan										
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Calon eksportir baru	840	750	780	750	96,15	810	875	108,02	
	Surat keterangan asal (SKA) diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan	109.000	147.052	107.000	116.422	108,81	108.000	134.183	124,24	
	Penghargaan eksportir berprestasi (Kriteria: berkinerja, pembangunan merek global, usaha kecil menengah ekspor, barang dan jasa ekonomi kreatif)	12	12	12	11	91,67	12	12	100	
	Nilai ekspor bersih perdagangan	1,7	0,64	1,5	-2,59	-172,67	1,6	-3,16	-197,5	



	(milliar US\$)									
	Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor	272	243	252	547	217,06	262	374	142,75	
	Persentase pertumbuhan ekspor non-migas	20,00	26,21	15,00	-13,02	-86,80	17,50	-3,03	-17,31	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan	10,00	9,5	8,50	10,45	122,94	9,50	8,48	89,26	
	Persentase kontribusi sub-sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim	24,00	23,95	23,50	24,32	103,49	23,75	25,07	105,58	
	Persentase pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang	10,50	-38,15	9,50	-46,74	-491,97	10,10	59,84	598,4	
	Inflasi terkendali	5±1	4,09	5±1	4,5	100,00	5±1	7,59	0	
	Kantor perwakilan dagang Jatim di provinsi mitra	3	6	5	5	100,00	9	11	122,22	



	Persentase pertumbuhan perdagangan antar wilayah/antar pulau antar provinsi	17,00	21,31	16,00	20,79	129,94	16,50	14,77	89,52	
	Resi gudang	300	84	150	85	56,67	225	116	51,56	
	Akses informasi dan perluasan jaringan pasar dalam negeri	40	110	35	115	328,57	35	144	411,43	
Program peningkatan perlindungan konsumen	Indeks kepuasan masyarakat	77,70	76,9	77,10	77,2	100,13	77,40	77,40	100	
	Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah	2,15	-7,53	2,10	-11,95	-569,05	2,10	1,37	65,24	
	Pertumbuhan industri alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	3,00	3,6	3,00	3,43	114,33	3,00	3,33	111	
	Pertumbuhan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	20,00	46,82	15,00	-24,24	-161,60	20,00	20,59	102,95	



	(UTTP)									
	Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk	3,75	-19,2	3,25	-13,85	-426,15	3,75	-25,64	-683,73	
	Persentase pengawasan barang dan jasa	3,75	8,63	9,00	9,25	102,78	10,00	3,05	30,5	



2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Disperindag Jawa Timur

Analisis kinerja pelayanan adalah serangkaian pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai yang dibutuhkan, dampaknya, serta identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Analisis kinerja pelayanan dimaksudkan untuk melihat sejauhmana capaian kinerja pelayanan dibanding target yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2009-2014. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang mendukung atau bahkan menghambat pencapaian target Renstra.

2.2.1. Kinerja Pelayanan

2.2.1.1. Kontribusi Sektor Industri dan Sub Sektor Perdagangan

Perekonomian Jawa Timur tahun 2012 tumbuh sebesar 7,27 persen dibandingkan 2011, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai lebih dari Rp. 1.000 triliun, yaitu sebesar Rp. 1.001,72 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2012 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional pada periode yang sama, yaitu sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi 2012 (y-on-y) terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,06 persen, dengan sumber pertumbuhan terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 3,20 persen. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menyusul pertumbuhan tertinggi kedua, sebesar 9,65 persen, dan Keuangan 7,20 persen. Penopang utama struktur ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, dengan kontribusi masing-masing sebesar 30,40 persen, 27,11 persen dan 15,42 persen secara berturut-turut. Apabila digabungkan, ketiga sektor tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar **72,93** persen terhadap perekonomian Jawa Timur.

Tabel 2.2.
Distribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku (%)

No	SEKTOR / SUB SEKTOR	ATAS DASAR HARGA BERLAKU		
		2010	2011	2012
1	Pertanian	15,75	15,39	15,42
2	Pertambangan dan Penggalian	2,19	2,24	2,08
3	Industri Pengolahan	27,49	27,13	27,11
4	Listrik, gas dan Air bersih	1,51	1,44	1,35
5	Konstruksi	4,49	4,67	4,55
6	Perdagangan, Hotel &	29,47	30,00	30,40
6.a	Subsektor Perdagangan	23,58	23,95	24,33
6.b	Subsektor Hotel	0,54	0,54	0,53
6.c	Subsektor Restoran	5,35	5,51	5,55
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,52	5,66	5,70
8	Keuangan, Persewaan & Js	4,90	4,93	5,05
9	Jasa – Jasa	8,68	8,55	8,35
	PDRB	100	100	100

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 2012

2.2.1.2. Kinerja Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan skala usahanya, pada tahun 2012 jumlah industri di Jawa Timur tetap didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (99,87%), sedangkan sisanya merupakan Industri Besar (0,013%). Berdasarkan jenis komoditinya, jumlah industri di Jawa Timur tahun 2012 terdiri dari Industri Agro dan Kimia (83,97%), Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (14,33%) dan Industri Alat Transportasi Elektronika dan Telematika (1,7%). Perkembangan industri Jawa Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan Industri di Jawa Timur 2009-2012

Jenis Industri	Satuan	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
INDUSTRI KECIL									
UNIT USAHA	Unit	700.588	3,68	726.357	5,57	766.783	1,61	779.090	0,87
TENAGA KERJA	Org	1.577.115	6,18	1.674.512	4,90	1.756.587	1,58	1.784.284	1,22
NILAI PRODUKSI	Milyar	61.007	6,41	64.920	4,76	68.007	1,50	69.025	5,84
NILAI INVESTASI	Milyar	24.050	6,42	25.595	4,76	26.814	1,48	27.211	2,10
INDUSTRI MENENGAH									
UNIT USAHA	Unit	15.109	2,96	15.556	4,02	16.182	1,27	16.387	0,59
TENAGA KERJA	Org	847.494	4,26	883.625	3,78	917.062	2,99	944.505	0,76
NILAI PRODUKSI	Milyar	47.750	5,47	50.360	3,47	52.106	4,19	54.291	0,96
NILAI INVESTASI	Milyar	15.837	4,88	16.610	3,89	17.256	3,59	17.875	5,64
INDUSTRI BESAR									
UNIT USAHA	Unit	744	1,88	758	30,61	990	7,07	1.060	0,38
TENAGA KERJA	Org	219.262	3,50	226.945	55,03	351.824	1,62	357.524	0,12
NILAI PRODUKSI	Milyar	71.169	5,14	74.827	7,20	80.215	2,36	82.108	1,44
NILAI INVESTASI	Milyar	17.039	3,27	17.596	7,20	18.863	2,04	19.247	4,80
TOTAL									
UNIT USAHA	Unit	716.441	3,66	742.671	5,56	783.955	1,60	796.537	0,87
TENAGA KERJA	Org	2.643.871	5,34	2.785.082	8,63	3.025.473	2,01	3.086.313	0,95
NILAI PRODUKSI	Milyar	179.926	5,66	190.107	5,38	200.328	2,54	205.424	2,79
NILAI INVESTASI	Milyar	56.926	5,05	59.801	5,24	62.933	2,22	64.333	3,89

Sumber : Disperindag Prov. Jatim

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan nilai produksi industri besar dan sedang Jawa Timur di tahun 2012 tumbuh sebesar 3,08% dibandingkan dengan periode tahun 2011, melebihi pertumbuhan industri besar dan Nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 2,55%. Jenis industri manufaktur besar dan sedang Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan tertinggi (*y-on-y*) diantaranya adalah : Industri Makanan (24,80%), Industri Komputer dan Barang Elektronik (14,14%), Industri Kendaraan Bermotor (13,60%), Industri Logam Dasar (10,38%) dan Industri Barang Galian Bukan Logam (8,45%).

Di sisi lain, pertumbuhan nilai produksi industri mikro dan kecil Jawa Timur pada 2012 tumbuh sebesar 1,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Jenis industri manufaktur mikro dan kecil Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan (*y-on-y*) diantaranya adalah : Industri Kertas dan Barang dari Kertas (22,37%), Industri Karet dan

Plastik (20,01%), Industri Kendaraan Bermotor (19,11%), dan Industri Mesin dan Perlengkapan (17,40%).

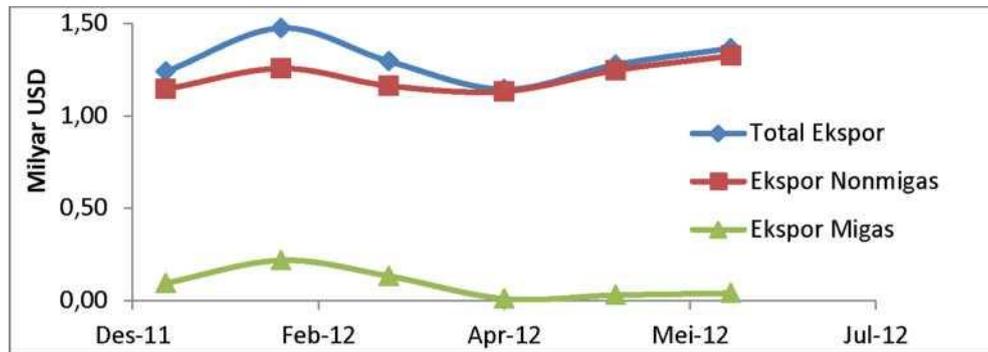
2.2.1.3. Kinerja Perdagangan Internasional

KINERJA EKSPOR

Di tahun 2012, beberapa indikator kinerja ekspor telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan meski beberapa indikator lainnya mengalami penurunan. Salah satu indikator kinerja yang cukup baik adalah akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor, yakni mencapai 547 jaringan dari tahun sebelumnya 243 jaringan. Sementara itu, persentase pertumbuhan ekspor minus -13,02 persen. Kinerja ekspor mengalami perlambatan sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi global.

Pada bulan Juni 2012, nilai ekspor Jawa Timur mencapai USD 1,365 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 7,03 persen dibanding ekspor bulan Mei 2012 yang mencapai USD 1,275 milyar. Dari total ekspor tersebut, ekspor migas bulan Juni mencapai USD 41,94 juta atau naik sebesar 40,39% dibanding bulan Mei 2012 yang mencapai USD 29,87 juta. Ekspor non migas bulan Juni mencapai USD 1,323 milyar atau naik sebesar 6,23% dibanding bulan Mei 2012 yang mencapai USD 1,245 milyar.

Selama semester I 2012, nilai ekspor Jawa Timur adalah senilai USD 7,751 milyar atau mengalami penurunan sebesar 24,77 persen dibanding semester I tahun 2011 yang nilainya USD 10,303 milyar. Penurunan ini disebabkan turunnya ekspor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar 38,5% dan 23,68%. Trend ekspor Jawa Timur dari bulan ke bulan selama Semester I tahun 2012 ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: BPS Jatim 2012, diolah

Grafik 2.1.
Perkembangan Ekspor Jatim

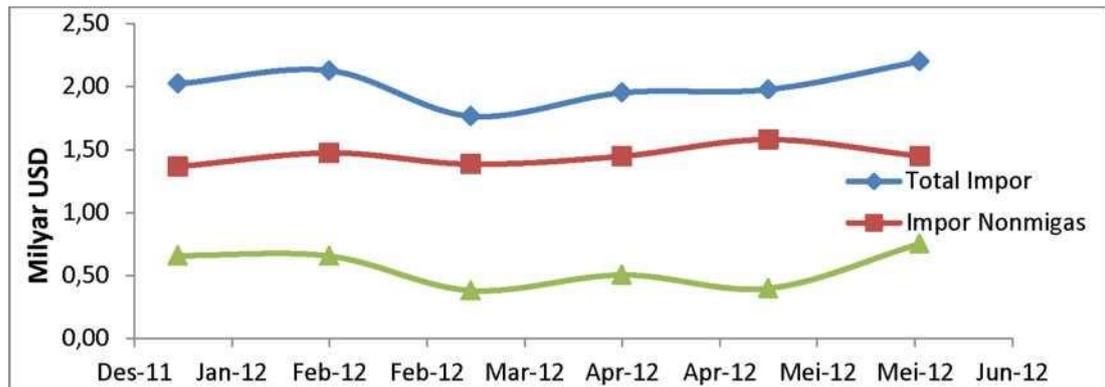
Selama bulan Juni 2012, ekspor non-migas Jawa Timur didominasi oleh perhiasan dan permata, kemudian lemak dan minyak hewan/nabati, kertas/karton, bahan kimia organik, serta kayu dan barang dari kayu. Negara tujuan ekspor non-migas Jawa Timur selama bulan Juni 2012 didominasi oleh Jepang, kemudian Amerika Serikat, Afrika Selatan, China dan Malaysia. Ekspor Jawa Timur ke lima negara ini mencapai 54,76% dari total ekspor non-migas.

Apabila kita melihat komposisi ekspor non migas maka kontribusi ekspor sektor industri adalah sebesar 89,09% dengan nilai USD 1,216 miliar dari total ekspor non migas yang mencapai US\$ 1,323 miliar, disusul produk-produk pertanian sebesar 7,72% atau dengan nilai hanya USD 0,105 milyar, pertambangan sebesar 0,11% atau dengan nilai USD 1,558 juta. Ini berarti bahwa ekspor produk-produk industri manufaktur masih menjadi andalan utama dalam mendongkrak kinerja ekspor Jawa Timur.

KINERJA IMPOR

Pada bulan Juni 2012, nilai impor Jawa Timur mencapai USD 2,200 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 11,26% dibanding impor bulan Mei 2012 yang mencapai USD 1,977 milyar. Dari total impor tersebut, impor migas mencapai USD 0,752 milyar atau naik sebesar 88,84% dibanding bulan Mei 2012 yang mencapai USD 0,398 milyar. Impor non migas bulan Juni mencapai USD 1,448 milyar atau turun sebesar 8,29% dibanding impor bulan Mei 2012 yang mencapai USD 1,579 milyar. Selama semester I 2012, nilai impor Jawa Timur adalah senilai USD 12,077 milyar, mengalami kenaikan sebesar 13,29

persen dibanding semester I tahun 2011 yang senilai USD 10,599 milyar. Impor non migas naik sebesar 11,26 persen atau USD 7,791 milyar pada semester I tahun 2011 menjadi USD 8,668 milyar pada semester I tahun 2012. Trend impor Jawa Timur dari bulan ke bulan selama semester I tahun 2011 terlihat dari grafik berikut:



Sumber: BPS Jatim (2012), diolah.

Grafik 2.2.
Perkembangan Impor Jatim

Selama bulan Juni 2012, impor nonmigas Jawa Timur didominasi oleh besi dan baja, kemudian ampas dan sisa industri makanan, mesin dan pesawat mekanik, plastik, barang dari plastik, serta pupuk. Negara asal impor nonmigas selama bulan Juni 2012 didominasi oleh China, kemudian Argentina, Amerika Serikat, Jepang dan Thailand. Impor Jawa Timur dari lima negara ini mencapai 48,82% dari total impor nonmigas. Berdasarkan golongan penggunaan barang, pada bulan Juni 2012 kontribusi barang konsumsi adalah sebesar 4,98% dengan nilai USD 0,109 miliar dari total impor non migas yang mencapai USD 2,200 miliar, kemudian bahan baku/penolong sebesar 86,16% atau dengan nilai USD 1,962 milyar, dan barang modal sebesar 5,86% atau dengan nilai USD 0,129 milyar. Demikian pula selama semester I tahun 2012, impor Jawa Timur didominasi oleh bahan baku/penolong (86,47%) disusul barang modal (6,86%) dan barang konsumsi (6,67%). Ini berarti bahwa impor Jawa Timur didominasi oleh impor bahan baku/penolong industri pengolahan.

2.2.1.4. Kinerja Perdagangan Dalam Negeri

- **Kinerja Kelancaran dan Efisiensi Distribusi dalam meredam Inflasi**

Sampai dengan akhir tahun 2012, secara kumulatif Jawa Timur mengalami inflasi 10,45 persen, lebih tinggi sedikit dari target sebesar 9,5 persen. Inflasi kumulatif Jawa Timur tahun 2012 naik apabila dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 9,5 persen. Namun demikian, dibandingkan inflasi kumulatif tahun 2010 sebesar 10,82 persen, kondisi tahun 2012 ini terlihat inflasi dapat dikendalikan. Sepanjang tahun 2012 Jawa Timur mengalami sembilan kali inflasi dan tiga kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,93 persen dan terendah bulan Mei sebesar 0,03 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 0,44 persen dan deflasi terendah bulan Maret sebesar 0,03 persen. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan Januari dan Juli.

Sejak tahun 2012, Disperindag Provinsi Jawa Timur telah memiliki SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi pasar berbasis web se-Jawa Timur yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website www.siskaperbapo.com. Laporan informasi harga dilakukan melalui website setiap hari oleh petugas monitoring harga di masing-masing Kab/Kota se-Jawa Timur, dengan jumlah komoditas yang di survey sebanyak 19 komoditas (40 varian). Adapun manfaat yang diperoleh melalui Siskaperbapo ini dalam rangka stabilitas harga bahan pokok, antara lain:

- a) Mengetahui variansi harga komoditas antar kab/kota di Jawa Timur.
- b) Untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah.
- c) Dengan adanya transparansi harga secara *online*, diharapkan dapat meminimalkan spekulasi dalam memainkan harga.
- d) Sebagai sistem deteksi dini bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Disamping itu, terdapat SMS *Center* Sistem Layanan Informasi Harga dalam Siskaperbapo, yaitu aplikasi SMS *Gateway* yang memberikan *update*

informasi harga komoditi terbaru dari www.siskaperbapo.com kepada masyarakat melalui SMS *request* ke nomor : **081 21 70000 21**, sehingga dapat diperoleh informasi harga secara *real time*.

- ***Kinerja Dalam Memberdayakan Komoditi Agro Melalui Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi Agro***

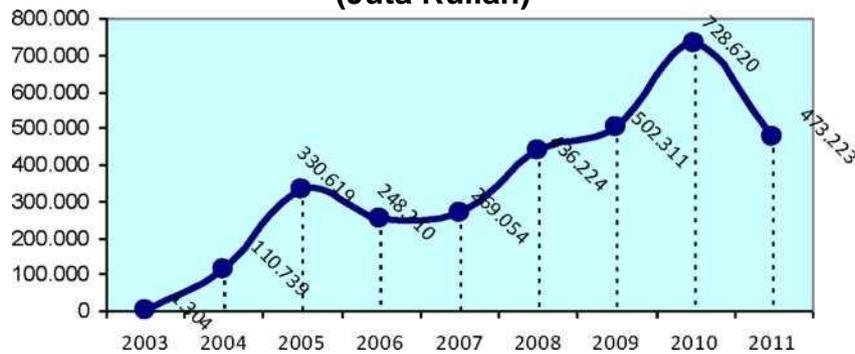
Dengan melihat fenomena selama ini bahwa sistem perdagangan lokal masih bersifat tradisional dan belum berkembang, maka perlu diciptakan suatu kelembagaan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan petani dan pembeli yang bergerak dalam kegiatan usaha hasil pertanian komoditi hortikultura (sayur mayur, padi-padian, buah-buahan dan tanaman hias) dengan konsep pengembangan Pasar Lelang Lokal yang bertujuan menciptakan system perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran serta mampu mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Manfaat adanya pasar lelang lokal, antara lain yaitu : terciptanya transparansi mekanisme pembentukan harga ditingkat lokal, meningkatkan posisi rebut tawar petani, mendorong peningkatan mutu dan produksi, meningkatkan efisiensi tata niaga, meningkatkan pendapatan petani. Untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan keuntungan di tingkat petani produsen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pasar Lelang sejak tahun 2003, kemudian mulai tahun 2010 penyelenggaraan Pasar lelang juga dilaksanakan di tingkat Bakorwil dengan tujuan mendekatkan dengan sentra-sentra produksi.

Hingga bulan Juni 2012 telah dilaksanakan 9 kali Pasar Lelang hasil komoditi pertanian dengan nilai transaksi mencapai Rp. 133.724.780.000,- dimana 6 kali pelaksanaan di Puspo Agro dengan nilai transaksi mencapai Rp. 125.041.530.000,-. Komoditi yang ditransaksikan adalah Bawang merah super, Beras IR 64 Medium, IR 64 super slyp, IR 64 kepala, Buah jambu merah, Coklat, Jeruk Pamelon, Kacang Hijau Lokal, Kopi Robusta, Makanan Tiwul Instan (Gatot), Pinang Coin, Apel manalagi, Ayam Beku, Beras Serang, Bumbu, Cabe Merah Keriting TM 99, Cabe Rawit Merah, Cengkeh Kering,

Daging sapi segar, daging sapi beku, Jagung pipilan hibrida, Jahe emprit, Kapulaga kering, Kentang granola, Kopra, Minuman kesehatan tonik apel, Tomat Dona, Wortel lokal, dll. Sedangkan 3 lainnya dilaksanakan di Bakorwil Madiun, Malang dan Bojonegoro dengan total nilai transaksi mencapai Rp. 8,683.250.000,- dengan komoditi yang ditransaksikan adalah Arang batok kelapa/tempurung, gapek/manioc kering, Jagung hibrida, Cabe rawit, Cokelat, Jagung Pipilan, Jambu Air, Kopi Robusta, Kubis Kol, Minyak Nilam, Pupuk Organik, Sayur Terong, Sayur Timur, Tomat Sayur, Beras IR 64, Beras IR 64 Broken, Gapek/Menyok Glondongan dan Kacang Tanah Kupas.

Grafik : Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang Tahun 2003 - 2011 (Juta Ruliah)



Sumber : Bidang PDN, diolah.

Grafik 2.4.
Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang 2003-2011

- **Kinerja Perdagangan Antar Antar Daerah**

Kinerja perdagangan antar daerah Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, ekspor barang dan jasa antar daerah meningkat 17,27%, di sisi lain impor barang dan jasa antar daerah meningkat 19,18%, sehingga terjadi surplus ekspor-impor sebesar Rp. 34,58 Triliun. Pada Triwulan-I 2012, ekspor barang dan jasa antar daerah meningkat 21,95%, di sisi lain impor barang dan jasa antar daerah meningkat 18,39%, sehingga terjadi surplus ekspor-impor sebesar Rp. 13,24 Triliun.

- **Kinerja Tertib Niaga**

Dalam rangka meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen sesuai amanat UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang aplikasinya terlihat dari perkembangan kinerja tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang perkembangannya cukup menggembirakan dari tahun ketahun, dimana tahun 2010 tera/tera ulang yang dilakukan oleh tujuh UPT Kemetrolgian di lingkungan Dinas Perindag mencapai 1.249.984 UTTP, Tahun 2011 1.55.918 UTTP. Sementara pengujian/kalibrasi/sertifikasi yang dilakukan oleh Bidang Metrologi Tahun 2010 mencapai 3.244 Unit, Tahun 2011 5.279 unit dengan demikian Kinerja tera/tera ulang serta sertifikasi metrologi legal Tahun 2010 mencapai 1.253.228 UTTP, sedangkan tahun 2011 mencapai 1.161.197 UTTP, seperti nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
PERKEMBANGAN KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG UTTP DAN
PENGUJIAN/KALIBRASI-SERTIFIKASI YANG DILAKUKAN DISPERINDAG
PROP. JATIM TAHUN 2005 – 2011

URAIAN	TAHUN							JUMLAH 7 Tahun
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TERA	132.690	391.171	405.573	420.615	391.644	312.284	221.446	2.275.423
TERA ULANG	967.928	1.187.183	994.331	939.858	927.139	937.700	934.472	6.888.611
PENGUJIAN/ KALIBRASI/ SERTIFIKASI	-	-	-	-	3.137	3.244	5.279	11.660
JUMLAH	1.100.168	1.578.354	1.399.904	1.360.473	1.321.920	1.253.228	1.161.197	9.175.694

Sumber : Bidang Metrologi-Disperindag Prov. Jatim

- **Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.**

Kinerja pengambilan contoh, pengujian dan inspeksi teknis dalam rangka sertifikasi mutu barang dari tahun ke tahun perkembangannya semakin menampakkan trend yang meningkat signifikan, hal ini menggambarkan peran UPT PSMB semakin dibutuhkan oleh dunia usaha dalam rangka sertifikasi produk, seperti nampak pada beberapa tabel berikut :

Tabel 2.5
 PENGAMBILAN CONTOH DALAM RANGKA SERTIFIKASI MUTU UPT
 PSMB & LT SURABAYA TAHUN 2005-2011

NO	KOMODITI	TAHUN							TOTAL
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kopi	994	816	742	831	1.12	1.08	787	6.377
2	Kakao	61	95	59	145	310	358	90	1.118
3	Pala	27	62	84	46	55	113	119	506
4	Fuli	17	76	70	43	50	72	78	406
5	Karet	28	149	59	59	98	72	22	487
6	Lada	2	4	13	5	3	6	9	42
7	Lada putih		3	11	1	2	11	7	35
8	Vanili			1	3		7	1	12
10	Pupuk	2	4	15	31	2	-	-	54
13	Tembakau	543	432	880	841	550	371	95	3.712
14	AMDK			12	23	20	-	-	55
15	Garam				4		-	-	4
16	Kayu					2	2	-	4
17	Biji Pinang						6	4	10
18	Cassiaver						12	9	21
	Total	1.67	1.64	1.94	2.03	2.21	2.11	1.221	12.843

Begitupula kinerja pengujian no akreditasi dari tahun ketahun perkembangannya semakin menampakkan trend yang meningkat cukup signifikan. Komoditi kopi dan tembakau serta kakao yang terbanyak dalam melakukan pengujian artinya komoditi ini banyak diekspor, seperti nampak pada beberapa tabel berikut :

Tabel 2.6

**PERKEMBANGAN PENGUJIAN NO AKREDITASI LP-036-IDN UPT
PSMB & LT SURABAYA TAHUN 2005-2011**

NO	KOMODITI	TAHUN							TOTAL
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Kopi	1.104	816	742	831	1.120	1.090	776	6.479
2	Kakao	61	95	59	145	310	357	77	1.104
3	Pala	27	62	84	46	55	108	118	500
4	Fuli	17	76	70	43	50	74	64	394
5	Karet	28	149	59	59	98	69	36	498
6	Lada Hitam	2	4	13	5	3	5	11	43
7	Lada putih		3	11	1	2	12	5	34
8	Vanili			1	3		3	1	8
10	Pupuk	2	4	35	133	2	9	4	189
11	Tembakau	543	432	880	841	550	371	78	3.695
12	Biji Pinang						8	3	11
13	Kayu Manis						14		14
14	DII					541	157		698
15	Cassiavera							7	7
16	Tepung Teri							1	1
	Total	1.784	1.641	1.954	2.107	2.731	2.277	1.181	7.486

Perkembangan Kalibrasi Akreditasi NO LK-030-IDN UPT PSMB & LT Surabaya Tahun 2005-2011, seperti nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.7

**PERKEMBANGAN KALIBRASI AKREDITASI NO LK-030-IDN UPT PSMB
& LT SURABAYA TAHUN 2005-2011**

NO	BESARAN	TAHUN							TOTAL
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Suhu	170	197	219	252	315	337	327	1.817
2.	Dimensi	20	41	60	117	70	83	55	446
3.	Tekanan	43	44	83	102	133	132	92	629
4.	Massa	114	101	163	136	258	248	246	1.266
5.	Optik	7	3	14	17	6	39	37	123
6.	Volumetrik	167	184	241	265	239	286	371	1.753
7.	Lain - Lain	60	31	46	53	101	150	228	669
	TOTAL	581	601	826	942	1.122	1.27	1.35	6.703

Sumber: Disperindag Prov. Jatim

Sedangkan Perkembangan Sertifikasi Produk No-Akreditasi LsPr 008-IDN UPT PSMB & LT Surabaya Tahun 2005 - 2011, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.8.

PERKEMBANGAN SERTIFIKASI PRODUK NO AKREDITASI LsPr-008-IDN UPT PSMB & LT SURABAYA TAHUN 2005 – 2011

NO	PRODUK	TAHUN							TOTAL
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1.	AMDK	-	1	12	22	25	7	28	95
2.	Garam Konsumsi	-	-	-	4			1	5
3.	Pupuk NPK	-	-	6	13	5	11	30	65
4.	Pupuk Kalium Klorida (KCl)	-	-	3	5			0	8
5.	Pupuk ZA	-	-	2	6	3		21	32
6.	Pupuk DAP	-	-	2	1			1	4
7.	Pupuk Urea	-	-	1	-	1		0	2
8.	Pupuk SP 36	-	-	1	-			6	7
9	Pupuk Fosfat Alam Untuk	-	-	-	7	3	5	13	28
10	Pupuk MAP	-	-	-	1			1	2
11	Pupuk Zeolit	-	-	-	1			0	1
12	Pupuk	-	-	-	1			2	3
13	Biji Kopi					2		0	2
14	Karet					15		0	15
15	Pupuk					1		0	1
16	Pupuk TSP						1	37	38
17	DII					59		12	71
	TOTAL	-	1	27	61	114	24	152	379

Sumber : UPT PSMB-LT Surabaya-Disperindag Prop. Jatim

Perkembangan pengujian dan sertifikasi serta kegiatan peningkatan mutu lainnya yang dilakukan oleh UPT PSMB-LT Jember selama tahun 2006 - 2011, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9.
PERKEMBANGAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PRODUK UPT
PSMB & LT JEMBER TAHUN 2006 – 2011

No	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	2011	KETERANGAN
1.	Pengambilan Contoh (kali)							
	- Tembakau	1.215	1.032	1.182	1.115	1.064	813	Laboratorium
	- Panili	19	17	7	3	4	-	Penguji
	- Karet Konvensional	-	2	2	-	-	-	ISO 17025
2.	Pengujian Sertifikasi (sertifikat)							
	- Tembakau	1.215	1.032	1.182	1.115	1.064	813	Laboratorium
	- Panili	19	17	7	3	4	-	Penguji
	- Karet Konvensional	-	2	2	-	-	-	ISO 17025
3.	Inspeksi Teknis (sertifikat)							
	- Mutu	29	20	7	12	358	342	Lembaga
	- Proses	16	10	525	492	148	218	Inspeksi
	- Panili	-	-	-	-	5	12	ISO 17020
4.	Pengujian Non Sertifikasi (contoh)							
	- Tembakau	190	144	158	498	279	87	
	- Panili	3	-	-	5	11	12	
	- Benih	2	2	2	6	4	3	
	- Rokok (Tar dan Nikotin)	-	-	-	-	138	105	
	- Kopi	-	-	-	-	-	4	
5.	Kegiatan lain (Di luar laboratorium)							
	- Pengawasan	1.241	960	947	741	1.228	828	
	- Pemeriksaan	1.622	1.462	1.087	517	548	443	
	- Fogging gudang (kali)	15	15	14	15	5	11	

Sumber : UPT PSMB-LT Jember - Disperindag Prov. Jatim

2.2.2. Permasalahan dan Hambatan

Walaupun capaian makroekonomi khususnya sektor industri dan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik, terdapat beberapa permasalahan terkait kedua sektor tersebut. Berbagai permasalahan yang

secara umum menghambat daya saing industri manufaktur maupun yang secara khusus dihadapi beberapa subsektor industri pengolahan di Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

- a) Ketidakpastian pasokan energo;
- b) Minimnya infrastruktur;
- c) Biaya transportasi yang mahal serta proses jasa kepelabuhan yang mempraktikkan ekonomi biaya tinggi membuat harga produk industri manufaktur lebih mahal dibanding produk impor;
- d) Kenaikan upah buruh, tarif listrik;
- e) Persoalan yang terkait dengan kawasan industri di Pasuruan (PIER) dan Surabaya (SIER) seperti isu sosial di titik porong yang menjadi titik penghubung atau akses ke arah pasuruan.

Sedangkan persoalan yang terkait dengan subsektor perdagangan antara lain adalah:

- a) Masih maraknya barang-barang yang masuk secara illegal dan produk dumping;
- b) Pola pikir konsumen yang cenderung ke produk impor;
- c) Masih lemahnya diversifikasi tujuan ekspor;
- d) Keterbatasan informasi yang dimiliki produsen komoditas ekspor tentang peluang perdagangan di luar Provinsi Jawa Timur;
- e) Keragaman ekspor yang masih sedikit karena kecenderungan ekspor komoditas bernilai tambah rendah (ekspr non-manufaktur);
- f) Belum efisiennya berbagai fasilitas perdagangan yang berkaitan dengan ekspor komoditas yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing produk;
- g) Panjangnya rantai pemasaran komoditas ekspor yang menyebabkan fluktuasi harga dan adanya perbedaan harga yang besar antara produsen dan konsumen;

2.2.3. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

- 1) Perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan dan pengembangan indag di Jawa Timur serta penetapan kinerja dari semua unit kerja di lingkungan Dinas Perindag agar mengacu pada sasaran-sasaran strategis yang ada dalam RPJMD/Renstra Dinas;
- 2) Menyelesaikan segera permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti: Permasalahan infrastruktur, regulasi yang membuat *high cost economic*, masalah Upah Buruh, kenaikan TDL, dll.
- 3) Membuat standarisasi / SNI diberlakukan dengan ketat / law enforcement harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;
- 4) Perlu adanya Instrumen safeguard untuk pengamanan perdagangan dalam bentuk bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).
- 5) Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
- 6) Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Jawa Timur.
- 7) Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Jawa Timur sebagai alternatif pengganti barang- barang impor (substitusi impor).
- 8) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADINDA Jawa Timur untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diekspor, seperti tepung ikan, tepung jagung dan lainnya.

- 9) Mengoptimalkan fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Provinsi lain sebagai mediator bagi pengusaha di Jawa Timur dan pengusaha di provinsi lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terkait pembangunan industri dan perdagangan dapat dilihat pada Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014.

Menurut Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014, terdapat beberapa strategi pembangunan perdagangan yang akan ditempuh selama 2010-2014, baik terkait perdagangan luar negeri maupun perdagangan dalam negeri.

Terkait perdagangan luar negeri, strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah.
Produk-produk ekspor yang didorong pengembangannya adalah produk hilir berbasis sumber daya alam, produk yang memiliki permintaan pasarnya besar, dan produk yang mendorong perluasan kesempatan kerja.
- b. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM).
- c. Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor pada negara tujuan akhir di mana produk akan dikonsumsi.
- d. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.
- e. Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- f. Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong

efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Strategi pembangunan perdagangan luar negeri di atas dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

- a. Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor
- b. Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor
- c. Peningkatan fasilitasi ekspor

Sementara itu, terkait pembangunan perdagangan dalam negeri strategi yang ditempuh selama tahun 2010-2014 adalah:

- a. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga.
- b. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha.
- c. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan alternative pembiayaan, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang.
- d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa
- e. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang yang efisien.

Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri di atas dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

- a. Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional

- b. Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi
- c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2010-2014, arah kebijakan pembangunan perindustrian mencakup beberapa hal pokok berikut:

- a. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional
- b. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah
- c. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar
- d. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa
- e. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Arah kebijakan pembangunan perindustrian di atas diimplementasikan ke dalam beberapa program unggulan, antara lain:

- a. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Manufaktur
- b. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
- c. Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- d. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah
- e. Program Pengembangan Perwilayahan Industri
- f. Program Kerja Sama Industri Internasional
- g. Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan, Mutu Industri

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai Rencana Strategis Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, tujuan program pembangunan perindustrian dan perdagangan adalah:

- a. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Prima dan Peningkatan Sarana serta Prasarana Aparatur Negara
- b. Terwujudnya Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

- c. Terwujudnya Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d. Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Konsumen.
- e. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- f. Terwujudnya Peningkatan Penataan Struktur Industri
- g. Terwujudnya Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
- h. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- i. Terwujudnya Peningkatan Standarisasi Industri
- j. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan di bidang perindustrian adalah:

- a) Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur.
- b) Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Jawa Timur.
- c) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri manufaktur.
- d) Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi.
- e) Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing.
- f) Meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan meningkatnya daya saing sektor ini dalam menghadapi produk impor.
- g) Meningkatnya pertumbuhan industri berorientasi ekspor yang menggunakan sumber daya lokal.
- h) Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis produk unggulan daerah (industri kompetensi inti daerah, agroindustri, OVOP, industri kreatif).
- i) Meningkatnya perkembangan sentra-sentra industri, termasuk industri kecil dan kerajinan.

Sementara sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan di bidang perdagangan adalah:

- a) Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekspor dan efisiensi perdagangan dalam negeri serta perlindungan konsumen.
- b) Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi.
- c) Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui pemberian insentif dan fasilitasi akses informasi dan sumber pembiayaan.
- d) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan yang kondusif dan dinamis.
- e) Meningkatnya kemitraan usaha.
- f) efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan
- g) Peningkatan dan penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang, penguatan kelembagaan kemetrolagian, penguatan kelembagaan pusat pelatihan dan promosi ekspor.

3.2 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merencanakan beberapa program dan kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 229.637.880.000 yang rencananya akan digunakan untuk memfasilitasi 11 program dan 92 kegiatan. Rincian program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1 (LAMPIRAN).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun 2014 merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Renstra ke dalam perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang industri dan perdagangan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan, baik di tingkat internasional, regional, nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan- kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2013 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2014 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Surabaya, Juli 2013
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19580720 198903 1 005

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun 2014 merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

2014. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Renstra ke dalam perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang industri dan perdagangan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan, baik di tingkat internasional, regional, nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2013 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2014 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Surabaya, Juli 2013

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19580720 198903 1 005